

PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DIBAWAH KEKUASAAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

Afrijal¹⁾, Helmi²⁾

^{1), 2)} Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala
[Jalan Tanoh Abee, Darussalam, Banda Aceh]

Email : afrijal@unsyiah.ac.id¹⁾; helmi_fisip@unsyiah.ac.id²⁾

Abstract

This study wants to answer how the implementation of special autonomy under the authority of local political parties in Aceh. Local parties have a majority vote in both the parliament and the executive, politically all forms of policies that lead to the welfare of the community will be realized easily. However, the people's expectations are not in line with the expectations and even the implementation of special autonomy in Aceh has not been effective and its management efficient. The purpose of this study is to examine more deeply about the implementation of special autonomy under the authority of local political parties in Aceh. The research method used in this study is a qualitative research method. Data collection techniques used are interviews, and documents. The findings in this study are that institutionally the Aceh government under the authority of local parties has succeeded in issuing policies that support the implementation of special autonomy in accordance with the mandate of the UUPA. On the other hand, when local parties came to power, they also failed to implement special autonomy in accordance with the aspirations of the Acehnese people. second; the influence of the local democratic system has broken the political party actors so that there is no organizational support in implementing special autonomy. Third, the quality of bureaucratic performance has not been able to realize Good Governance in government management resulting in ineffective and inefficient policies produced.

Keywords: *Special Autonomy, Local Party, Aceh*

Abstrak

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana pelaksanaan otonomi khusus dibawah kekuasaan partai politik lokal di Aceh. Partai local memiliki suara mayoritas baik diparlemen maupun di eksekutif, secara politik segala bentuk kebijakan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat akan terealisasi dengan mudah. Namun harapan masyarakat tidak sesuai dengan ekpektasi bahkan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh belum efektif dan efesien pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan otonomi khusus dibawah kekuasaan partai politik lokal di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif*. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumen. temuan dalam penelitian ini bahwa secara kelembagaan pemerintah Aceh dibawah kekuasaan partai local berhasil mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksnaan otsus sesuai dengan Amanah UUPA. Disisi yang lain ketika partai local berkuasa juga gagal dalam pelaksana otsus sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh. *kedua*; pengaruh sistem demokrasi local sudah memecahkan aktor parlok sehingga tidak ada dukungan organisasi dalam melaksanakan otsus. Ketiga, Kualitas kinerja birokrasi belum mampu mewujudkan Good Governance dalam pengelolaan pemerintahan mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak efektif dan efisiensi.

Kata Kunci: *Otonomi Khusus, Partai Lokal, Aceh*

1. Pendahuluan

Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan dikenal dengan desentralisasi Asimetris, selain diakui dalam UUD 1945, kebijakan ini dinggap mampu mengahiri kesejangan dan ketimpangan yang ada didaerah yang mendapatkan otonomi khusus, di Indonesia ada beberapa daerah yang mendapatkan kekhususan salah satunya adalah provinsi Aceh, Aceh merupakan daerah yang terletak di paling ujung Indonesia. Selain goeografis yang strategis juga memiliki sejarah Panjang dalam peradaban politik dan Pemerintahan Indonesia.

Melalui kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh yang tertuang dalam undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, status ini telah membawa perubahan yang signifikan terhadap dinamika pembangunan di Aceh, berdasarkan kebijakan ini pemerintah Aceh mendapatkan kompensasi anggaran yang besar dan kewenangan yang luas untuk mengembangkan diri sendiri menuju Aceh yang lebih maju. keseriusan pemerintah Aceh dalam membangun juga bisa dilihat dari berbagai program prioritas dalam qanun Aceh, dan telah mentransformasikan UUPA kedalam Qanun/Perda untuk mendistribusikan dana otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan dana otonomi khusus melalui peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 tahun 2015 tentang rencana induk pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh tahun 2008-2027. Pedoman ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Aceh dalam dalam mewujudkan pembangunan yang terarah. Kebijakan ini juga didukung oleh partai politik local untuk bangkit bersama menuju Aceh sejahtera. Dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah Aceh saat ini, telah membawa perubahan besar terhadap perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, indek pembangunan manusia, Pendidikan dan investasi. Kekuasaan partai politik local diparlemen yang mendominasi dapat dengan mudah mentransformasi UUPA kedalam Qanun/Perda Aceh.

Kekuatan di parlemen dapat memberi peluang untuk pemerintah Aceh agar memanfaatkan hak kekhususannya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersifat kesejahteraan masyarakat menumbuh kembangkan, pembangunan yang merata dan pelayanan public yang baik, oleh sebab itu, otonomi khusus yang sebenarnya bertumpu pada kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat, dirasakan semua pihak merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi berbagai problematika menyangkut hubungan pusat dan pemerintahan daerah, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan mtlak. (Mallaranggeng,2006:219)

Partai politik local adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kedudukan dan ruanglingkupnya hanya dalam satu provinsi saja. Adapun dasar pembentukan partai local disebabkan oleh system Desentralisasi asimetris telah membuka ruang kepada daerah untuk membentuk partai local, sebagai sebuah wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kehadiran partai local masih kurang perencanaan sehingga belum maksimal dalam menyalurkan aspirasi tersebut, dan kerap kepentingan elit-elit local, sama halnya dengan kurangnya perencanaan DOB daerah yang pro dan kontra beberapa pihak, sehingga DOB tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan dan justru digunakan sebagai alat politik oleh elit-elit local. (Nasir, 2022)

Schattscheider, E.E, menyatakan partai politik adalah jantung dari demokrasi perwakilan, melalui partai politiklah sirkulasi elite dan kepemimpinan politik sebuah negara berjalan, baik buruknya demokrasi terletak pada kualitas partai politik. Karena memperbaiki demokrasi tanpa menyentuh perbaikan partai politik adalah perubahan yang tak esensial. Berdasarkan teori instutionalisasi partai politik. Dapat disimpulkan bahwa dengan cara itu terjadi hubungan yang simetris antara pemberian otonomi di satu pihak dengan saluran aspirasi masyarakat lokal melalui partai politik yang tidak perlu menjadi sub-ordinat partai politik nasional. (Plod Ugm, 2008:233)

Lahirnya partai lokal dapat memberikan keuntungan politis bagi kelompok-kelompok kepentingan untuk merebutkan kekuasaan, dengan hadirnya partai lokal sudah memberi jalan sebagai kendaraan politik untuk menggerakkan kekuasaan dalam pemerintahannya baik di legislative maupun eksekutif. Keberadaan partai lokal dapat merangkul semua aspirasi masyarakat Aceh lebih spesifik dibandingkan dengan partai nasional dengan demikian, masyarakat Aceh dapat mengharapkan tuntutan mereka kepada partai lokal. Untuk itu partai lokal dapat mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

Ketika partai lokal menguasai kursi mayoritas di legislatif otomatis sangat mudah menjalankan roda pemerintahan, memanfaatkan dukungan legislative akan memberikan sinyal positif kepada eksekutif yang merupakan yang merupakan masih partai satu ayah. Kekuasaan yang melegitimasi pada partai lokal dapat mewajibkan seluruh elemen masyarakat untuk wajib mengakui dan mengikuti otoritas dari pemerintahan (Heywood,2014:13). Dengan kata lain kekuasaan partai lokal dalam melaksanakan otonomi khusus di Aceh mendapatkan dukungan dari organisasi politik, administratif dan sumber dana yang masih tersedia. Aceh merupakan satu dari empat daerah yang memiliki hak

istimewa atau kekhususan dengan dana otonomi khusus yang besar hal ini akan menjadi suatu tugas pemerintah Aceh dalam melaksanakan roda pemerintahannya dengan tepat sasaran, (Serambinews.com19/08/2016) dana yang cukup besar dapat mendukung pemerintah Aceh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi di Aceh sudah mulai terasa sejak adanya otonomi khusus.

Pemerintah Aceh sejak tahun 2008 telah mendapatkan dana otonomi khusus berupa tranfer dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi Aceh selama dua puluh tahun sebagai bagian dari dintadak lanjut pelaksanaan UUPA. Dana otonomi khusus ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pemerintah Aceh telah menerima 90 Triliun lebih dana otonomi khusus, dengan harapan pemerintah Aceh bisa bangkit dari keterpurukann setelah konflik berkepanjangan dan diperparah dengan Tsunami.

Dengan demikian pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk melahirkan program inovasi dalam membangun Aceh, Akan tetapi harapan masyarakat Aceh tidak sesuai dengan kenyataan pemerintah Aceh dianggap gagal dalam menyejahterakan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kesejangan dan ketimpangan yang masih tinggi di Aceh termasuk kemiskinan yang tertinggi di wilayah Sumatera selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang dapat menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan otsus dibawah kekuasaan partai lokal Aceh?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persolan dalam pelaksanaan otonomi khusus dibawah kekuasaan partai politik local di Aceh, dan kenapa Aceh tidak sejahtera dibawah kekuasaan partai local.

METODOLOGI

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sehingga penelitian ini yang digunakan bersifat deskriptif dan mengedepankan analisis mendalam mengenai pelaku dan cenderung pada proses perspektif subjektif. Teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, Pustaka (*Library Research*). Dokumen secara langsung kepada pihak-pihak terkait masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anaisis Data deskriptif kualitatif melalui data sekunder dan primer (Meleong, 2006:78)

Kajian Pustaka

Menurut Rondinelli, (2012). Kesuksesan daerah desentralisasi itu sangat ditentukan oleh beberapa Aspek, pertama komitmen politik dan dukungan adminitratif dapat mempengaruhi kineja pemerintah. Kedua, budaya masyarakat setempat juga dapat mendorong pelaksanaan daerah desentralisasi. Ketiga, kelembagaan adalah hal

yang paling penting untuk memdukung tugas pemerintah daerah khusus. Keempat, keuangan adalah factor penentu program-program pemerintah, apa yang dijelaskan diatas tadi pemerintah dalam hal ini sudah sangat kompleks untuk melaksanakan kekhususan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, (Syaukani, dalam Ferizaldi 2019).

Torabi, L, K., (2014). Melakukan kajian tentang ekfektifitas pelaksanaan otonomi khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat didistrik jaya pura, temuan dalam kajian ini mengenai pelaksanaan program-program pemerintah yang bersumber dari dana otsus sudah cukup baik, dan pemerintah daerah juga mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. namun belum bisa dimanfaatkan secara efektif program tersebut.

Rahma, M (2021), melakukan penelitian tentang otonomi khusus dan dinamika perekonomian, fokusnya penelitian ini berkaitan dengan dinamika perekonomian, Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pemerintah mengalami kendala dalam melaksanakan kebijakan kekhususan disebabkan oleh Lembaga mengalami pemerintah mengalami perbedaan persepsi dalam menerjemahkan kekhususan daerah setempat, sehingga gagal dalam mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi

Marpaung, A, L (2019) menjelaskan bahwa otonomi daerah secara tidak langsung memperkuat eksistensi institusi pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat. Namun demikian, inipun tergantung dari visi pemerintah daerah itu sendiri. Bagi elite politik lokal yang visioner seperti Lombok Barat, otonomi daerah adalah kesempatan membangkitkan kekuatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya. Namun, kondisi ini akan lebih ideal apabila nasib pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat tidak tergantung pada kebijakan daerah itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan seolah-olah dengan adanya otonomi daerah beban masyarakat bisa teratasi.

Rousdy Said (2004) melakukan penelitian tentang rencana strategis otonomi daerah penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan kekuasaan lewat otonomi daerah yang ada untuk diperlukan pemberian kewenangan sesuai dengan karakteristiknya sehingga tidak terjadi kepincangan dalam proses pembangunan, penelitian masih sangat umum dan tidak menjelaskan pembangunan sebagai apa, akan tetapi yang menjadi kendala adalah sempitnya kekuasaan daerah yang diberikan oleh pusat dan kurangnya kreatifan kekuasaan lokal.

Beberapa penelitian diatas sangat komrehensif dan menarik untuk dibaca, namun masih sangat luas kajiannya sedangkan penelitian yang penulis kaji sudah spesifik ada perbedaan dan keunikan dari faku kajian, dimana penelitian ini secara spesifik menyoroti kinerja pemerintah yang didominasi oleh partai politik local di Aceh, meskipun ada kesamaan tentang otonomi khusus. Dengan demikian berdasar penelusuran penulis belum ada kajian yang persis sama dengan penelitian ini

2. Pembahasan

1.1 Partai Politik Lokal Aceh

Kehadiran partai lokal di Aceh secara tidak langsung dapat memberikan perubahan terhadap pembangunan secara menyeluruh di Aceh walaupun partai lokal mayoritas menguasai pemerintahan di Aceh tetapi masih belum bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh, bahkan keberadaan partai lokal masih tidak bisa menjadi solusi untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh sebagaimana di amanahkan oleh UUPA No 11 Tahun 2006.

Partai lokal tidak bisa menampung aspirasi masyarakat yang ada, hal ini di buktikan dengan berkurangnya tingkat kepercayaan public terhadap partai lokal menurun drastis, seharusnya dengan legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh partai lokal dapat mengayomi dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan dana segar dari otonomi khusus yang begitu meningkat dari tahun ke tahun.

Partai local tidak bisa menjadi sebuah solusi yang optimal terhadap dinamika politik yang terjadi di daerah dibandingkan dengan kehadiran partai nasional atau menjadi harapan masyarakat terhadap kebijakan yang menguntungkan masyarakat kurang mampu di Aceh. sebagaimana Amanah UUPA salah satu tupoksi parlok adalah menciptakan kesejahteraan dalam lingkup demokrasi.

Ketika partai politik lokal mendapatkan kesempatan berkuasa secara menyeluruh justru yang terjadi bukan kesejahteraan melainkan konflik internal sesama tokoh politik lokal yang ingin menjadi orang nomor satu baik di kabupaten/kota maupun di provinsi. Sistem demokrasi dapat memecah belah aktor-aktor politik yang ingin berkuasa seperti yang terjadi pada 2012 dan 2017 nanti, perpecahan ini bukan kemajuan sistem demokrasi di Indonesia tetapi dalam konteks Aceh perpecahan ini justru menjadi kekhawatiran nasib partai politik lokal kedepan, apakah masih eksis atau gagal, oleh karena itu, partai politik harus mengawasi setiap kader yang duduk di DPRA berdasarkan kinerja, dan memberikan sanksi bagi yang berkinerja rendah. Dalam menentukan kader yang akan duduk di parlemen, partai politik harus mempertimbangkan basis pengetahuan dan wawasan legislatif.

Dengan demikian akan membangun Kembali kepercayaan public terhadap partai politik lokal yang ada di Aceh mengingat hanya satu partai lokal yang masih eksis dan berkuasa di Aceh yaitu Partai Aceh (PA).

1.2 Kekuasaan elite lokal

Kualitas elite politik partai lokal saat ini belum mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

menjalankan tugasnya, hal ini disebabkan oleh pengaruh kelompok kepentingan. Komunikasi elit local dengan masyarakat dingap belum berjalan dengan baik.

Tokoh politik yang diharapkan oleh masyarakat Aceh adalah yang mampu menampung aspirasi dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi khusus, tetapi yang terjadi di Aceh justru berbalik. (Munir, 2015:11)

Pelaksanaan otonomi khusus menjadi permasalahan yang signifikan yang berpengaruh terhadap serial Panjang kemiskinan, dengan dana otonomi khusus yang mencapai 49,8 Triliun belum ada perubahan terhadap infrastruktur-suprastruktur, transportasi, kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini merupakan ketidak berhasilannya penguasa partai lokal untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Aceh menuju kesejahteraan sebagaimana tujuan otonomi khusus itu sendiri.

Pembangunan yang mengalami disorientasi dengan getol mengejar pencapaian target, berupa angka-angka yang bersifat statiska. Tetapi mengabaikan fakta sesungguhnya yang terjadi dilapangan ataupun ditengah masyarakat yakni target pada indeks bukan pada realita. Padahal pelaksanaan otonomi khusus bukan sekedar mencapai indeks pembangunan yang menjadi indikator keberhasilan seharusnya lebih mengacu pada tatanan multi dimensional yang secara nyata terwujud. Meningkatnya angka pengangguran tentu diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan yang berpengaruh kepada masyarakat.

Pembangunan yang mengejar nilai indeks untuk di publikasikan kepada masyarakat tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang baik dan pembangunan yang merata. Maraknya demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah merupakan suatu kegagalan pemerintah Aceh dalam memberikan pembangunan yang merata secara fakta bukan pada nilai indeks. (Munir, 2015:22)

1.3 Kinerja Birokrasi

Birokrasi pemerintah Aceh juga lamban dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan hal ini dibuktikan dengan banyaknya program prioritas pemerintah Aceh yang belum maksimal, salah satunya adalah ketidakmampuan para birokrasi mewujudkan implementasi UUPA ke dalam Qanun Aceh. dengan demikian menunjukkan bahwa peran pemerintah Lembaga tidak efektif dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

Permintaan reformasi birokrasi dalam lingkungan pemerintah Aceh juga membuktikan ada sesuatu yang salah dalam penyelenggara pemerintah, baru-baru ini PJ.Gubernur Aceh secara resmi menggantikan Sekda Aceh, sebenarnya keinginan ini sudah jauh-jauh hari diminta oleh DPRA, pihak legislative menganggap sekda tidak substansi dalam menjalankan tugasnya, DPRA menganggap sekda lebih banyak melakukan kampanye dibandingkan dengan mengurus patologi birokrasi menjadi lebih baik. Seperti apa yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRA “ Sekda Aceh bukan membenah tubuh birokrasi yang membutuhkan reformasi dilingkungan pemerintah Aceh akan tetapi lebih mengurus urusan yang bukan tupoksinya yaitu melakukan kampanye ke daerah kabupaten” dalam penyetaan ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak seirama antara birokrasi pemerintah Aceh dengan DPRA.

DPRA sebagai bagian dari pemerintah daerah yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi, legislasi, anggaran dan pengawasan, saat ini belum mampu mewujudkan kollaborasi dengan baik dengan pemerintah Aceh (Gubernur) alih-alih melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif, serapan anggaran yang tidak signifikan serta konflik dua Lembaga ini menunjukkan bahwa pihak DPRA belum bisa memaksimalkan kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini bisa dilihat dari kinerja DPRA dalam menghasilkan kebijakan dari UUPA ke Qanun Aceh

Lemahnya fungsi kontroling di sektor lainnya menjadi perhatian penting bagi DPRA kedepannya. Mutu Pendidikan Aceh masih berada diurutan bawah, besarnya anggaran dinas Pendidikan tidak serta-merta dapat meningkatkan kualitas Pendidikan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat juga tidak mampu mengontrol secara menyeluruh akan menimbulkan kemiskinan yang semakin meningkat, seharusnya pemerintah mengedepankan fungsi kontroling secara langsung menyentuh kebutuhan perekonomian masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Bagaimana dengan pengawasan sektor Kesehatan, anggaran yang dialokasikan disektor ini jumlahnya besar tapi jumlah orang yang sakit atau tingkat Kesehatan masyarakat Aceh memiliki kualitas Kesehatan rendah, adanya jaminan Kesehatan bukan berarti tingkat Kesehatan masyarakat Aceh terjamin mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik. Budaya pelayanan dalam birokrasi yang berbelit-belit justru membuat masyarakat lebih membingungkan bukan mendapatkan pelayanan yang prima (Yudistira, 2014:300)

Sesungguhnya elite birokrasi di Aceh sangat berpengaruh dalam penentuan masa depan Aceh ditengah-tengah gelombang permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Aceh belakangan ini, para pemimpin itu

menggunakan cara-cara kreatif untuk memikat dukungan rakyat maupun pemerintah pusat. Strategi yang diterapkan oleh elite lokal untuk menanggung keuntungan besar-besarnya dari kesempatan yang disodorkan oleh otonomi dan pemekaran. Sementara pada saat yang sama berusaha menjaga kepercayaan rakyat yang sudah terlanjur tidak percaya pada pemerintah yang bagi mereka banyak yang telah terbukti gagal tidak ada seperti janji-janji politik semasa kampanye. (Klinken, 2014:595)

Kondisi ini berbalik dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penurunan praktik korupsi dan membaiknya tata Kelola pemerintahan. Fenomena korupsi dan daya serap keuangan, berkaitan erat dengan sistem dan budaya kerja birokrasi. Hal ini menjadi ironi karena permasalahan juga muncul ketika pemerintah Aceh dikuasai oleh partai lokal yang sebelumnya gencar-gencar mengkampanyekan pembenahan dalam birokrasi pemerintahan secara menyeluruh.

3. Kesimpulan

KESIMPULAN

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan otonomi khusus belum mampu memberikan solusi terbaiknya dengan jumlah dana otonomi khusus yang mencapai 90 triliun tidak memberikan efek nyata terhadap kesejahteraan yang menyeluruh kepada masyarakat Aceh, tidak ada pembangunan yang bermonumental dari pelaksanaan otonomi khusus sehingga masyarakat merasa pemerintah Aceh belum mampu mengoptimalkan dana otsus untuk mengentaskan kesenjangan pembangunan. Padahal memungkinkan Aceh menjadi contoh dalam pembangunan bagi daerah lain. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan Makmur. Dengan demikian kehadiran partai local juga belum mampu memberikan efek positif dalam mewujudkan UUPA menjadi Qanun Aceh/Perda. Kekuasaan local hanya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kekhususan Lembaga. Disisi lain pemerintah Aceh telah melakukan upaya-upaya untuk membangun Aceh melalui kekhususan ini. Untuk itu, kekhususan dapat memberikan efek positif terhadap penurunan kesenjangan di Aceh. diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otsus dengan melibatkan pihak kampus, Lembaga mitra dan masyarakat dalam membuat melaksanakan kekhususan.

Daftar Pustaka

- Agus, P, 2013. Elite Politik. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
Andre. H, 2014. Politik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

- Afan .2005. Otonomi daerah,dalam Negara kesatuan.Yayasan Obor Indonesia.Jakarta
- Bahan Bacaan S2 Plod UGM. Partai Politik.2008.Pemilu dan Legislasi Daerah,S2 Plod UGM,Yogyakarta
- CS Hartati, S Abdullah, M Saputra, 2016. Pengaruh penerimaan dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil migas terhadap belanja modal serta dampaknya pada indeks pembangunan manusia
- Ferizaldi, 2019. Model Akuntabilitas Birokrasi di Era Otonomi Khusus Aceh, Jurnal Universitas Riau 2019
- Klinken, .2014.Politik lokal di Indonesia.Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.
- Miftahur Rahma, 2021. Pengaruh dana otonomi khusus, indeks pembangunan manusia dan infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di Kabupaten /kota provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin Jakarta
- Marpaung, A, L (2019) Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal. Pusaka Media. Lampung
- Mallaranggeng,A, 2006, Blue Prien (Otonomi Daerah di Indonesia) kemitraan .Jakarta
- Meleong, L, 2006. Metode penelitian Kualitatif. Yogyakarta
- Nasir, A and Atmojo E, 2022. Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi batu Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019, Jurnal Pemerintah dan Politik, Universitas Indo Global Mandiri. Vol 7 No 1 2022
- Torabi, L, K. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik jayapura Utara Kota Jayapura, Jurnal Administrasi, Unstrat, Vol 2 No 3 2014
- Yudhistira Aryadi, Muhammad and -, Dr. Erma Setiawati, M.M., Ak and -, Dr. Zulfikar, M.S (2022) *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Dampak Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Yarmen Dinamika, 2016 Serambinews.com19/08/2016)